

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pelaporan Keuangan

Menurut Fahmi (2012) pelaporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Pelaporan keuangan merupakan proses penyampaian informasi keuangan yang meliputi segala spek didalamnya misalnya lembaga-lembaga terkait ataupun prinsip dan peraturan yang berlaku.

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan alat informasi yang menggabungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

Most menunjukkan dua pendekatan dalam penentuan tujuan penyediaan informasi (pelaporan keuangan) yaitu:

1. Menyediakan informasi untuk sehimpunan pengguna umum yang mempunyai bermacam-macam kepentingan keputusan
2. Menyediakan informasi untuk kelompok pemakai tertentu yang mempunyai kepentingan tertentu yang diketahui.

Tujuan utama pelaporan keuangan dalam rerangka konseptual *Financial Accounting Standards Board* (FASB, 1991) adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditor pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan investasi, kredit, dan semacamnya yang rasional. Informasi harus dipahami bagi mereka yang mempunyai pengetahuan yang memadai tentang berbagai kegiatan bisnis dan ekonomik dan bersedia untuk mempelajari informasi dengan cukup tekun.
2. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor serta pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai jumlah, saat terjadi, dan ketidakpastian penerimaan kas mendatang dari dividen atau bunga dan pemerolehan kas mendatang dari penjualan, penebusan, atau jatuh temponya sekuritas atau pinjaman. Dengan cara lain, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor serta pemakai lain dalam menilai jumlah, saat terjadi, dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha bersangkutan.
3. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomik suatu badan usaha, klaim terhadap sumber-sumber tersebut (kewajiban badan usaha untuk mentransfer sumber daya ekonomik ke entitas lain dan ekuitas pemilik), dan akibat-akibat dari transaksi, kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya badan usaha dan klaim terhadap sumber daya tersebut.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Menurut Abdul (2018) laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Karakteristik kualitatif laporan

keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

a. Memiliki manfaat umpan balik

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan secara lengkap, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap

butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan

b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh

c. Netralitas

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan

kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

1. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk mengakui pendapatan laporan operasional, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

2. Nilai historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

3. Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan berbasis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

4. Substansi mengguli bentuk formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan raelitas ekonomi, dan bukan hanya sfek formalitasnya.

5. Perioderitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).

7. Penguungkapan lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Penyajian wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.2 Ketepatan Waktu Dan Keandalan Pelaporan Keuangan

2.1.2.1 Ketepatan Waktu Dalam Pelaporan Keuangan

Gusrita (2013) menjelaskan bahwa, ketepatan waktu atau ketepatan waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005). Tersedianya informasi lama setelah suatu kejadian yang memerlukan tanggapan atau keputusan berlalu menjadikan informasi tersebut tidak mempunyai nilai lagi.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan rentan waktu mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik sejak tanggal tutup buku. Penyampaian informasi sedini mungkin dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan mencegah agar terlambatnya pembuatan keputusan tersebut dapat diartikan sebagai tepat waktu (Rachmawati, 2014). Laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu agar relevansi dan nilai dari laporan keuangan tidak berkurang untuk pengambilan keputusan.

Dwiyanti (2010) mendefinisikan ketepatan waktu menjadi dua yaitu ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan. Dan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan juga dijadikan sebagai indikator apakah laporan keuangan yang disajikan relevan atau tidak. Indikator pada ketepatan waktu laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Informasi tersedia ketika dibutuhkan
2. Laporan periode tertentu disediakan secara sistematis dan teratur.

Kendala ketepatanwaktuan penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan. Ketepatanwaktu berarti bahwa informasi harus segera tersedia bagi para pemakai untuk membantunya mengambil keputusan, sehingga membuat informasi itu menjadi lebih relevan terhadap kebutuhan mereka. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada dasarnya tidak selalu berpengaruh pada relevansi laporan keuangan, namun relevan berkaitan erat dengan ketepatan waktu laporan keuangan (Harrison Jr, 2012).

2.1.2.2 Keandalan Dalam Pelaporan Keuangan

Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar dan valid (Muslikha, 2015). Keandalan pelaporan keuangan harus menyajikan informasi secara jujur dan dapat diverifikasi dalam setiap laporan keuangan. Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah telah ditentukan berdasarkan empat karakteristik dalam Standar Akuntansi Pemerintah (ASP) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

1. Relevan

Penyusunan laporan keuangan yang relevan merupakan informasi yang memiliki manfaat dan dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Manfaat informasi yang relevan yaitu memiliki manfaat umpan balik untuk menegaskan dan mengoreksi ekspektasi pengguna di masa lalu dan memiliki manfaat predekit (*predictive value*)

yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, serta informasi tersebut harus tepat waktu untuk pengguna informasi dalam pengambilan keputusan.

2. Andal

Keandalan pelaporan keuangan yaitu menyajikan informasi keuangan secara benar dan valid. Keandalan pelaporan keuangan dengan pemahaman terhadap aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Menurut Anggrelia (2016) pelaporan keuangan yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

a. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan hasil yang sama.

b. Netralis

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Penyajian jujur

Menggambarkan keadaan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar.

3. Dapat dibandingkan

Penyajian informasi laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya, dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

4. Dapat dipahami

Penyajian pelaporan keuangan bermanfaat jika mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan dan mampu mempelajari informasi tersebut.

Menurut Winidyaningrum dan Rahmawati. (2010) indikator kualitas keandalan pelaporan keuangan adalah:

1. Penyajian jujur Informasi harus digambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk asset, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.
2. Substansi mengungguli bentuk Jika informasi dimaksudkan untuk menyakin dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.
3. Netralitas Informasi harus diarahkan pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.
4. Pertimbangan sehat Penyusunan laporan keuangan ada kalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral, dan karena itu tidak memiliki kualitas andal.
5. Kelengkapan Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan beban. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansinya.

6. Dapat dibandingkan Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antara perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan, transaksi, dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan bersangkutan, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

2.1.3 Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Irmawati, 2018).

Setiap penilaian kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangannya, dilihat dari kompetensi sumber daya manusia tersebut dalam penerapan sistem akuntansi agar dalam penyusunan laporan keuangan tidak terjadi kesalahan. Ilmu akuntansi merupakan faktor yang berpengaruh untuk keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, kompetensi terlihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang keuangan.

Menurut Sutrisno (2010) sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah sumber daya yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti: kecerdasan, kreativitas dan imajinasi. Maka indikator yang akan dipergunakan untuk mengukur kapasitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

1. Pengalaman yang baik
2. Pendidikan sesuai pekerjaan
3. Keterampilan sesuai tugas

Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam satu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaannya misi tersebut dikelola oleh manusia. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan organisasi. Selanjutnya manajemen sumber daya manusia berarti mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum.

2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah sistem berbasis IT (Ilmu Teknologi) yang digunakan untuk mengolah data dalam memproses, menyusun dan menyimpan data untuk menghasilkan informasi yang relevan dan akurat yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak, database, jaringan, dan jenis teknologi lainnya (Mushlika Diawati, 2015). Teknologi informasi menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data sesuai dengan kebutuhan dan digunakan agar data dapat diakses secara global. Pemanfaat teknologi mencakup pengolahan data, pengolahan informasi, dan proses kerja secara elektronik agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah oleh masyarakat sehingga dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntansi mampu menciptakan laporan keuangan yang andal dan cepat, serta memiliki keakuratan data.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk

meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Perkembangan teknologi tidak hanya dimanfaatkan pada suatu organisasi dibidang sektor publik. Sistem informasi dalam akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data (Anggreli, 2016).

Mustafa (2011) indikator pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

1. Memiliki perangkat komputer
2. Memiliki dan memanfaatkan jaringan internet
3. Menggunakan komputer dari awal proses pembuatan laporan keuangan sampai akhir
4. adanya perbaikan alat yang rusak/ usang.

2.1.5 Sistem Pengendalian Intern

Rai (2011) menyatakan, Sistem Pengendalian Intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasaran.Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat insidental dan responsif atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus-menerus.

Menurut Levany (2011), Sistem pengendalian intern yang baik akan dapat memprediksi terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang layak, walaupun terjadi kesalahan dan penyelewengan hal ini dapat diketahui dengan cepat. Usaha-usaha pimpinan perusahaan untuk menetapkan sistem pengendalian intern yang baik bertujuan untuk menunjang organisasi lebih efektif dalam rangka mencapai

tujuannya. Bentuk-bentuk pengendalian yang sudah umum dapat dipilih dan diterima dengan membandingkan antara biaya dengan manfaat yang diharapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keterandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Mahmudi (2010), terdapat indikator pengendalian intern sebagai berikut:

1. Pengendalian organisasi dan operasi
2. Pengendalian pengembangan sistem dan dokumentasi
3. Pengendalian data dan prosedur

2.2 Penelitian Sebelumnya

Irmawati dan Yulia (2020) melakukan penelitian dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada PT. PLN Kota Banda Aceh. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal berpengaruh terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada PT. PLN Banda Aceh.

Dian dkk (2020) melakukan penelitian dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Wajo. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Penelitian ini membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia dan standar akuntansi pemerintah

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wajo.

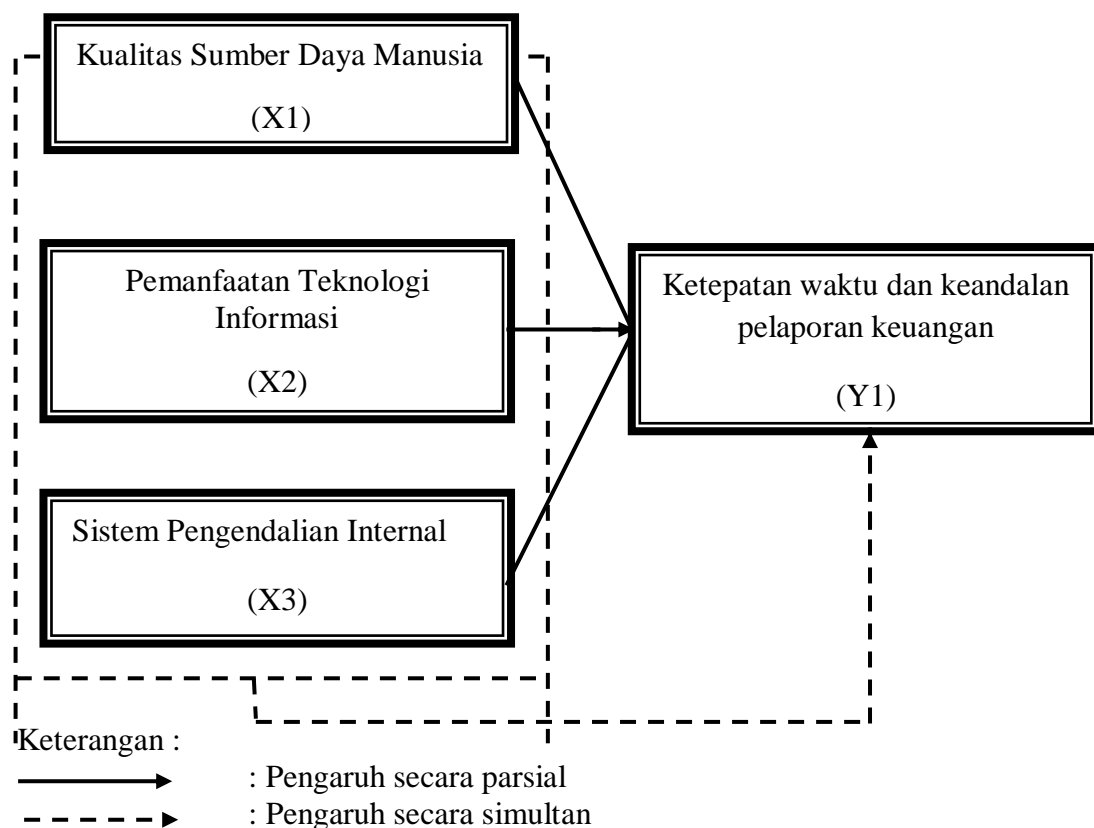
Irene (2018) melakukan penelitian dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah Kota Salatiga. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal lebih dominan berpengaruh atas ketepatan waktu laporan keuangan.

Septiawan (2017) meneliti mengenai faktor –faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan, pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Een dkk (2020) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, dan pengawasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebaliknya penelitian ini menemukan bahwa seluruh variabel independen tidak signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berisi gambaran pengaruh antar variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan pengendalian intern merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Variabel independen ini akan diprediksi pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu ketepatan waktu dan keandalan pelaporan keuangan. Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting (Sugiono, 2015).



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap objek penelitian yang dilakukan (Arikunto, 2013). Berdasarkan pengaruh antara variabel-variabel yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu bahwa diduga

kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap ketepatan waktu dan keandalan pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara simultan maupun parsial.